

OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /POJK.05/2020

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI OLEH LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

|  |  | Batang Tubuh | Penjelasan | Tanggapan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menim-bang | : | 1. bahwa untuk melaksanakan kewenangan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor lembaga jasa keuangan nonbank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga jasa keuangan nonbank; | Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan bahwa fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Adapun tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan adalah agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. |  |
|  |  | 1. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan kualitas pelayanan lembaga jasa keuangan nonbank kepada konsumen namun dapat meningkatkan risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank sehingga perlu adanya penerapan manajemen risiko teknologi informasi; | Perkembangan teknologi informasi merupakan salah satu dampak dari perkembangan zaman yang mengalami kemajuan yang pesat dari waktu ke waktu. Banyak hal yang melatarbelakangi perkembangan teknologi informasi tersebut, salah satunya adalah adanya kebutuhan masyarakat yang dituntut untuk dapat menjalankan segala sesuatunya dengan lebih mudah dan efektif.  Di sektor jasa keuangan, teknologi informasi pun memiliki peran yang sangat penting. Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional LJKN) serta kualitas pelayanan LJKNB kepada konsumen.  Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi juga memiliki potensi risiko yang dapat merugikan LJKNB dan konsumen pengguna jasa dan produk LJKNB. Oleh karena itu, agar dapat melindungi kepentingan LJKNB dan juga konsumen, LJKNB dituntut untuk dapat menerapkan manajemen risiko teknologi informasi secara efektif sehingga LJKNB dapat melakukan pengendalian atas kemungkinan risiko yang akan terjadi.  Keberhasilan penerapan manajemen risiko teknologi informasi sangat tergantung pada komitmen manajemen dengan melibatkan seluruh jenjang organisasi di LJKNB sebagai pengguna teknologi informasi, sehingga diperlukan keterlibatan dan pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.  Ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi LJKNB serta pihak terkait dalam penggunaan Teknologi Informasi. Kepatuhan LJKNB terhadap ketentuan ini diharapkan dapat membangun kesadaran dan pemahaman yang menyeluruh bagi LJKNB terhadap peran dan potensi risiko atas penggunaan Teknologi Informasi. |  |
|  |  | 1. bahwa dalam rangka harmonisasi dan integrasi pengaturan mengenai manajemen risiko teknologi informasi yang berlaku bagi lembaga jasa keuangan nonbank, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai manajemen risiko teknologi informasi; dan | Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, ketentuan terkait manajemen risiko teknologi informasi yang sebelumnya diatur di masing-masing LJKNB diharmonisasikan secara terpadu dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Manajemen Risiko Teknologi Informasi LJKNB ini. |  |
|  |  | 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penerapan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank; |  |  |
| Meng-ingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477); |  |  |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957); |  |  |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); |  |  |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); |  |  |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618); |  |  |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835); |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | MEMUTUSKAN: |  |  |
| Mene-tapkan | : | PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI OLEH LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK. |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | KETENTUAN UMUM |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: |  |  |
|  |  | 1. Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang selanjutnya disebut LJKNB adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. |  |  |
|  |  | 1. Layanan Keuangan Elektronik (*Digital Services*) adalah layanan bagi konsumen untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi melalui media elektronik. |  |  |
|  |  | 1. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. |  |  |
|  |  | 1. Pusat Data (*Data Center*) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan Sistem Elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data. |  |  |
|  |  | 1. Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia. |  |  |
|  |  | 1. Pangkalan Data (*Database)* adalah sekumpulan data komprehensif dan disusun secara sistematis, dapat diakses oleh pengguna sesuai wewenang masing-masing, dan dikelola oleh administrator Pangkalan Data (*Database administrator*) |  |  |
|  |  | 1. Rencana Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Plan*) adalah dokumen yang berisikan rencana dan langkah-langkah untuk menggantikan dan/atau memulihkan kembali akses data, perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan, agar LJKNB dapat menjalankan kegiatan operasional bisnis yang kritikal setelah adanya gangguan dan/atau bencana |  |  |
|  |  | 1. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum koperasi. |  |  |
|  |  | 1. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum koperasi. |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | LJKNB meliputi: |  |  |
|  |  | 1. perusahaan perasuransian, yang terdiri atas: |  |  |
|  |  | 1. perusahaan asuransi; | Perusahaan asuransi termasuk juga unit syariah dari perusahaan asuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah. |  |
|  |  | 1. perusahaan reasuransi; | Perusahaan reasuransi termasuk juga unit syariah dari perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya. berdasarkan prinsip syariah. |  |
|  |  | 1. perusahaan asuransi syariah; | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. perusahaan reasuransi syariah; | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. perusahaan pialang asuransi; | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. perusahaan pialang reasuransi; dan | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. perusahaan penilai kerugian asuransi; | Cukup jelas. |  |
|  |  | sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian; |  |  |
|  |  | 1. dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun; | Dana pensiun termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah. |  |
|  |  | 1. lembaga pembiayaan, yang terdiri atas: |  |  |
|  |  | 1. perusahaan pembiayaan; | Perusahaan pembiayaan termasuk juga unit usaha syariah dari perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah. |  |
|  |  | 1. perusahaan pembiayaan syariah; | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. perusahaan modal ventura; | Perusahaan modal ventura termasuk juga unit usaha syariah dari perusahaan modal ventura yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah. |  |
|  |  | 1. perusahaan modal ventura syariah; | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. perusahaan pembiayaan infrastruktur; | Perusahaan pembiayaan infrastruktur termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah. |  |
|  |  | sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan; |  |  |
|  |  | 1. lembaga jasa keuangan lainnya, yang terdiri atas: |  |  |
|  |  | 1. perusahaan pergadaian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian; | Perusahaan pergadaian termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah. |  |
|  |  | 1. perusahaan pergadaian syariah; | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. lembaga penjamin, yang terdiri atas: |  |  |
|  |  | 1. perusahaan penjaminan; | Perusahaan penjaminan termasuk juga unit usaha syariah dari perusahaan penjaminan yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah. |  |
|  |  | 1. perusahaan penjaminan syariah; | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. perusahaan penjaminan ulang; dan | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. perusahaan penjaminan ulang syariah, | Cukup jelas. |  |
|  |  | sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan; |  |  |
|  |  | 1. penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi; | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. perusahaan pembiayaan sekunder perumahan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan sekunder perumahan; | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. badan penyelenggara jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan penyelenggara jaminan sosial; dan | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai PT Permodalan Nasional Madani (Persero), | Cukup jelas. |  |
|  |  | yang menggunakan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan usaha. |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | RUANG LINGKUP MANAJEMEN RISIKO  TEKNOLOGI INFORMASI |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 1. LJKNB wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penggunaan Teknologi Informasi. | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup: | Cukup jelas. |  |
|  |  | * 1. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; |  |  |
|  |  | * 1. kecukupan kebijakan, standar, dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi; |  |  |
|  |  | * 1. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko penggunaan Teknologi Informasi; dan |  |  |
|  |  | * 1. sistem pengendalian internal atas penggunaan Teknologi Informasi. |  |  |
|  |  | 1. Penerapan manajemen risiko harus dilakukan secara terintegrasi dalam setiap tahapan penggunaan Teknologi Informasi sejak proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan hingga penghentian dan penghapusan sumber daya Teknologi Informasi. | Yang dimaksud dengan “sumber daya Teknologi Informasi” antara lain perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, sumber daya manusia, data, dan informasi. Perangkat keras adalah 1 (satu) atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.  Perangkat lunak adalah 1 (satu) atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik. |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi oleh LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha LJKNB. | Kompleksitas usaha meliputi antara lain:   1. keragaman dalam kegiatan usaha dan produk; 2. jaringan kantor cabang; dan/atau 3. teknologi pendukung yang digunakan. |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | LJKNB wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas dari Direksi, Dewan Komisaris, dan pejabat pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi. | Penetapan wewenang dan tanggung jawab perlu memperhatikan antara lain prinsip pemisahan tugas dan tanggung jawab (*segregation of duties*), misalnya pihak yang melakukan input data berbeda dari pihak yang melakukan validasi data. |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Wewenang dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit mencakup: |  |  |
|  |  | 1. menetapkan rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi dan kebijakan LJKNB terkait penggunaan Teknologi Informasi; | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. menetapkan kebijakan, standar, dan prosedur terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi yang memadai dan mengomunikasikannya secara efektif, baik pada satuan kerja penyelenggara maupun pengguna Teknologi Informasi; | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. memastikan: |  |  |
|  |  | 1. Teknologi Informasi yang digunakan LJKNB dapat mendukung perkembangan usaha LJKNB, pencapaian tujuan bisnis LJKNB dan kelangsungan pelayanan terhadap konsumen LJKNB; | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. terdapat kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penyelenggaraan dan penggunaan Teknologi Informasi; | Peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan mengenai penyelenggaraan dan penggunaan Teknologi Informasi. |  |
|  |  | 1. ketersediaan sistem pengelolaan pengamanan informasi (*information security management system*) yang efektif dan dikomunikasikan kepada satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi; | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. penerapan proses manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi dilaksanakan secara memadai dan efektif; | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. kebijakan, standar, dan prosedur Teknologi Informasi diterapkan secara efektif pada satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi; | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. terdapat sistem pengukuran kinerja proses penyelenggaraan Teknologi Informasi yang paling sedikit dapat: | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. mendukung proses pemantauan terhadap implementasi strategi; |  |  |
|  |  | 1. mendukung penyelesaian proyek pengembangan Teknologi Informasi; |  |  |
|  |  | 1. mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia dan investasi pada infrastruktur; dan |  |  |
|  |  | 1. meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan Teknologi Informasi dan kualitas layanan penyampaian hasil proses kepada pengguna Teknologi Informasi. |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit mencakup: | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi LJKNB; dan |  |  |
|  |  | 1. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi. |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direksi dapat melibatkan satuan kerja yang membawahkan fungsi manajemen risiko. | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terkait dengan: | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. rencana pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha LJKNB; |  |  |
|  |  | 1. perumusan kebijakan, standar, dan prosedur Teknologi Informasi yang utama; |  |  |
|  |  | 1. kesesuaian antara proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan rencana pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi; |  |  |
|  |  | 1. kesesuaian antara pelaksanaan proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati (project charter); |  |  |
|  |  | 1. kesesuaian antara Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha LJKNB; |  |  |
|  |  | 1. efektivitas langkah-langkah dalam meminimalisasi risiko atas investasi LJKNB pada sektor teknologi informasi agar investasi LJKNB pada sektor teknologi informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis LJKNB; |  |  |
|  |  | 1. pemantauan atas kinerja teknologi informasi dan upaya peningkatan kinerja teknologi informasi; |  |  |
|  |  | 1. upaya penyelesaian berbagai masalah terkait teknologi informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara teknologi informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu; dan |  |  |
|  |  | 1. kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki LJKNB. |  |  |
|  |  | 1. Direksi dapat membentuk komite pengarah Teknologi Informasi guna mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2). | Cukup jelas. |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | KECUKUPAN KEBIJAKAN, STANDAR, DAN PROSEDUR PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 1. LJKNB wajib memiliki kebijakan, standar, dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b. | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. LJKNB wajib menerapkan kebijakan, standar, dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi secara konsisten dan berkesinambungan. | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. Kebijakan, standar, dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi paling sedikit meliputi aspek: |  |  |
|  |  | * 1. manajemen; | Yang dimaksud dengan “manajemen” antara lain Direksi dan Dewan Komisaris. |  |
|  |  | * 1. pengembangan dan pengadaan; | Cukup jelas. |  |
|  |  | * 1. operasional Teknologi Informasi; | Cukup jelas. |  |
|  |  | * 1. jaringan komunikasi; | Cukup jelas. |  |
|  |  | * 1. pengamanan informasi; | Cukup jelas. |  |
|  |  | * 1. Rencana Pemulihan Bencana; | Cukup jelas. |  |
|  |  | * 1. penggunaan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi; dan | Cukup jelas. |  |
|  |  | * 1. penyediaan jasa Teknologi Informasi oleh LJKNB. | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. LJKNB wajib menetapkan limit risiko yang dapat ditoleransi untuk memastikan aspek terkait Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berjalan dengan optimal. | Yang dimaksud dengan “limit risiko” adalah tingkat kesalahan yang masih dapat ditoleransi oleh sistem (*risk tolerance*) atau standar pengamanan yang ditetapkan atau disetujui untuk tidak dilampaui. Standar pengamanan sebagaimana dimaksud di atas disesuaikan dengan *risk appetite* yang dimiliki LJKNB. |  |
|  |  | 1. LJKNB wajib melakukan kaji ulang dan pengkinian kebijakan, standar, dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala. | Kaji ulang dan pengkinian dilakukan agar kebijakan, standar, dan prosedur tetap sesuai dengan perkembangan zaman, LJKNB, dan Teknologi Informasi. |  |
|  |  | 1. LJKNB wajib menetapkan jangka waktu kaji ulang dan pengkinian kebijakan, standar, dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam kebijakan secara tertulis. | Cukup jelas. |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | * + 1. LJKNB wajib menyampaikan rencana pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi yang mendukung rencana strategis kegiatan usaha LJKNB. | Rencana pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi merupakan rencana pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi yang bersifat mendasar, termasuk informasi mengenai biaya pengembangan dan pemeliharaan teknologi, antara lain:   1. perubahan secara signifikan terhadap konfigurasi teknologi informasi atau aplikasi inti LJKNB; 2. pengadaan aplikasi inti baru; 3. kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi; dan 4. pengembangan dan pengadaan teknologi informasi mendasar lainnya yang dapat menambah dan/atau meningkatkan risiko LJKNB. |  |
|  |  | * + 1. Rencana pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kebijakan dan rencana manajemen pada rencana bisnis LJKNB. | Cukup jelas. |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | KECUKUPAN PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, DAN PENGENDALIAN RISIKO PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 1. LJKNB wajib memiliki kebijakan, standar, dan prosedur dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko penggunaan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c. | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. LJKNB wajib melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko penggunaan Teknologi Informasi. | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko penggunaan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit terhadap aspek terkait Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3). | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. Dalam hal LJKNB menggunakan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi, LJKNB wajib memastikan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi menerapkan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Cukup jelas. |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Dalam melakukan pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi, LJKNB wajib melakukan langkah pengendalian untuk menghasilkan sistem dan data yang terjaga kerahasiaan dan integrasi serta mendukung pencapaian tujuan LJKNB, antara lain mencakup: |  |  |
|  |  | 1. menetapkan dan menerapkan prosedur dan metodologi pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi secara konsisten; | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. menerapkan manajemen proyek dalam pengembangan sistem; | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. melakukan uji coba yang memadai pada saat pengembangan dan pengadaan suatu sistem, termasuk uji coba bersama satuan kerja pengguna, untuk memastikan keakuratan dan berfungsinya sistem sesuai kebutuhan pengguna serta kesesuaian sistem yang satu dengan sistem yang lain; | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. melakukan dokumentasi atas pengembangan dan pemeliharaan sistem; | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. memiliki manajemen perubahan sistem aplikasi; | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. memastikan sistem Teknologi Informasi LJKNB mampu menampilkan kembali informasi secara utuh jika diperlukan; dan | Informasi yang ditampilkan kembali terkait dengan sistem yang tidak lagi digunakan dalam operasional LJKNB, *proprietary system*, maupun sistem yang masih digunakan dalam operasional LJKNB namun mengalami gangguan.  Yang dimaksud dengan “secara utuh” adalah informasi yang ditampilkan lengkap dan akurat. |  |
|  |  | 1. memastikan pembuatan perjanjian tertulis atas perangkat lunak yang dianggap penting untuk kelangsungan operasional LJKNB dalam hal perangkat lunak dibuat oleh pihak lain dan kode sumber tidak diberikan kepada LJKNB. | Yang dimaksud dengan “kode sumber” adalah suatu rangkaian perintah, pernyataan, dan/atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang dapat dibaca dan dipahami. Kode sumber ditempatkan pada pihak independen berdasarkan kesepakatan antara Bank dan pihak pembuat kode sumber. |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | LJKNB wajib memastikan kelangsungan dan kestabilan operasional Teknologi Informasi serta memitigasi risiko yang berpotensi dapat mengganggu kegiatan operasional LJKNB. | Cukup jelas. |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | LJKNB wajib menyediakan jaringan komunikasi yang memenuhi prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*). | Cukup jelas. |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Bagi LJKNB yang menyelenggarakan kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki unit usaha syariah atau unit syariah wajib memiliki sistem yang dapat menghasilkan laporan terpisah bagi kegiatan unit usaha syariah atau unit syariah. | Yang dimaksud dengan “memiliki sistem yang dapat menghasilkan laporan terpisah” adalah sistem yang dapat mengidentifikasikan *input*, proses, dan *output* dari transaksi berdasarkan prinsip syariah. |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 1. LJKNB wajib memiliki Rencana Pemulihan Bencana. | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. LJKNB wajib memastikan Rencana Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara efektif agar kelangsungan operasional LJKNB tetap berjalan saat terjadi bencana dan/atau gangguan pada sarana Teknologi Informasi yang digunakan LJKNB. | Rencana Pemulihan Bencana mencakup rencana pemulihan pada berbagai tingkat bencana dan gangguan seperti:   1. *minor disaster* yang berdampak kecil dan tidak memerlukan biaya besar serta dapat diselesaikan dalam jangka waktu pendek; 2. *major disaster* yang berdampak besar dan dapat menjadi lebih parah apabila tidak diatasi segera; dan/atau 3. *catastrophic* yang berdampak terjadinya kerusakan yang bersifat permanen sehingga memerlukan relokasi atau penggantian dengan biaya yang besar. |  |
|  |  | 1. LJKNB wajib melakukan uji coba atas Rencana Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap seluruh aplikasi dan infrastruktur yang kritikal sesuai hasil analisis dampak bisnis (*business impact analysis)* secara berkala dengan melibatkan pengguna Teknologi Informasi. | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. LJKNB wajib melakukan kaji ulang atas Rencana Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala. | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. LJKNB wajib menetapkan jangka waktu uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam kebijakan secara tertulis. | Cukup jelas. |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cukup jelas. |  |
|  |  | LJKNB wajib memastikan pengamanan informasi dilaksanakan secara efektif dengan memperhatikan paling sedikit: |  |  |
|  |  | 1. pengamanan informasi yang ditujukan agar informasi yang dikelola terjaga kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan; |  |  |
|  |  | 1. pengamanan informasi yang dilakukan terhadap aspek teknologi, sumber daya manusia, dan proses dalam penggunaan Teknologi Informasi; |  |  |
|  |  | 1. pengamanan informasi yang diterapkan berdasarkan hasil penilaian terhadap risiko (*risk assessment*) pada informasi yang dimiliki LJKNB; dan |  |  |
|  |  | 1. ketersediaan manajemen penanganan insiden dalam pengamanan Informasi. |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | SISTEM PENGENDALIAN DAN AUDIT INTERNAL ATAS PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 1. LJKNB wajib melaksanakan sistem pengendalian internal secara efektif terhadap seluruh aspek penggunaan Teknologi Informasi. | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. pengawasan oleh manajemen dan adanya budaya pengendalian; |  |  |
|  |  | 1. identifikasi dan penilaian risiko; |  |  |
|  |  | 1. kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi; |  |  |
|  |  | 1. sistem informasi, sistem akuntansi, dan sistem komunikasi; dan |  |  |
|  |  | 1. kegiatan pemantauan dan koreksi penyimpangan, yang dilakukan oleh satuan kerja operasional, satuan kerja audit internal maupun pihak lain. |  |  |
|  |  | 1. Sistem informasi, sistem akuntansi, dan sistem komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus didukung oleh teknologi, sumber daya manusia, dan struktur organisasi LJKNB yang memadai. | Yang dimaksud dengan memadai antara lain teknologi yang sesuai dengan kegiatan operasional LJKNB, sumber daya manusia yang kompeten dan struktur organisasi yang tidak memberikan peluang untuk melakukan dan/atau menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan. |  |
|  |  | 1. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling sedikit meliputi: | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. kegiatan pemantauan secara terus menerus; |  |  |
|  |  | 1. pelaksanaan fungsi audit internal yang efektif dan menyeluruh; dan |  |  |
|  |  | 1. perbaikan terhadap penyimpangan yang diidentifikasi oleh satuan kerja operasional, satuan kerja audit internal, dan/atau pihak lain. |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Pelaksanaan fungsi audit internal Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan mengenai standar pelaksanaan fungsi audit internal. | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. Untuk memastikan pelaksanaan audit internal Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b, LJKNB wajib memastikan ketersediaan jejak audit (*audit trail*) atas seluruh kegiatan penyelenggaraan Teknologi Informasi untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lain. | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. Pelaksanaan fungsi audit internal Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh auditor eksternal. | Penggunaan auditor eksternal untuk melaksanakan fungsi audit internal atas Teknologi Informasi tidak mengurangi tanggung jawab pimpinan satuan kerja audit internal. Selain itu penggunaan auditor eksternal harus mempertimbangkan ukuran dan kompleksitas usaha LJKNB serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai auditor eksternal.  Dalam hal LJKNB menggunakan auditor eksternal untuk melaksanakan fungsi audit internal atas Teknologi Informasi, proses *Enterprise Data Management* tetap harus dijalankan oleh satuan kerja audit internal. |  |
|  |  | 1. LJKNB wajib melaksanakan audit internal terhadap seluruh aspek dalam penyelenggaraan dan penggunaan Teknologi Informasi sesuai kebutuhan, prioritas, dan hasil analisis risiko Teknologi Informasi secara berkala. | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. LJKNB wajib menetapkan jangka waktu pelaksanaan audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam kebijakan secara tertulis. | Cukup jelas. |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 1. LJKNB wajib memiliki pedoman audit internal atas penggunaan Teknologi Informasi yang diselenggarakan oleh LJKNB sendiri dan/atau oleh pihak penyedia jasa Teknologi Informasi. | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. LJKNB wajib melakukan kaji ulang atas fungsi audit internal dalam penggunaan Teknologi Informasi secara berkala. | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan jasa pihak eksternal yang independen. | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. LJKNB wajib menetapkan jangka waktu kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kebijakan secara tertulis. | Cukup jelas. |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI OLEH LJKNB DAN/ATAU PIHAK PENYEDIA JASA TEKNOLOGI INFORMASI |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Bagian Kesatu |  |  |
|  |  | Umum |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Penyelenggaraan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan usaha LJKNB dapat dilakukan oleh LJKNB sendiri dan/atau pihak penyedia jasa Teknologi Informasi. | Penyelenggaraan Teknologi Informasi antara lain penempatan Sistem Elektronik pada Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana.  Penyelenggaraan Teknologi Informasi yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa Teknologi Informasi dapat dilakukan secara berkesinambungan dan/atau dalam periode tertentu.  LJKNB yang menyerahkan penyelenggaraan Teknologi Informasi kepada pihak penyedia jasa Teknologi Informasi maka LJKNB tetap disebut penyelenggara Sistem Elektronik untuk setiap Sistem Elektronik yang digunakan LJKNB dalam menjalankan kegiatan usahanya. |  |
|  |  | 1. Dalam hal penyelenggaraan Teknologi Informasi LJKNB dilakukan oleh pihak penyedia jasa Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LJKNB wajib: |  |  |
|  |  | * 1. bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko; | Yang dimaksud tanggung jawab LJKNB dalam menerapkan manajemen risiko antara lain dengan memastikan bahwa penyedia jasa Teknologi Informasi menerapkan manajemen risiko secara memadai pada kegiatan LJKNB yang diselenggarakan oleh pihak penyedia jasa Teknologi Informasi sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |
|  |  | * 1. memiliki fungsi yang membawahkan Teknologi Informasi; | Cukup jelas. |  |
|  |  | * 1. melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan LJKNB yang diselenggarakan oleh pihak penyedia jasa; | Cukup jelas. |  |
|  |  | * 1. memilih pihak penyedia jasa Teknologi Informasi berdasarkan analisa biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis*) dengan mengikutsertakan fungsi yang membawahkan Teknologi Informasi; | Cukup jelas. |  |
|  |  | * 1. memantau dan mengevaluasi keandalan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi secara berkala yang menyangkut kinerja, reputasi penyedia jasa, dan kelangsungan penyediaan layanan; | Cukup jelas. |  |
|  |  | * 1. memberikan akses kepada auditor internal, auditor eksternal, dan Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh data dan informasi setiap kali dibutuhkan; | Yang dimaksud “memberikan akses” yaitu memberikan hak untuk memperoleh data dan informasi agar pemeriksaan dapat dilaksanakan secara efektif. |  |
|  |  | * 1. memberikan akses kepada Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pangkalan Data secara tepat waktu, baik untuk data terkini maupun untuk data yang telah lalu; dan | Akses terhadap Pangkalan Data antara lain penyediaan terminal, *user id* untuk mengunduh data, dan mengunduh data. |  |
|  |  | * 1. memastikan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi: |  |  |
|  |  | * + 1. memiliki tenaga ahli yang memiliki keandalan dengan didukung oleh sertifikat keahlian secara akademis dan/atau secara profesional sesuai dengan keperluan penyelenggaraan Teknologi Informasi; | Cukup jelas. |  |
|  |  | * + 1. menerapkan prinsip pengendalian Teknologi Informasi (*information technology control*) secara memadai yang dibuktikan dengan hasil audit yang dilakukan pihak independen; | Syarat ini dimaksudkan untuk meyakini bahwa Pusat Data, Pusat Pemulihan Bencana, dan/atau jasa Teknologi Informasi yang digunakan oleh LJKNB memiliki pengendalian Teknologi Informasi yang memadai paling sedikit mencakup pengamanan fisik dan pengamanan *logic*. |  |
|  |  | * + 1. menyediakan akses bagi auditor internal LJKNB, auditor eksternal yang ditunjuk oleh LJKNB, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau pihak lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berwenang untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka memperoleh data dan informasi yang diperlukan secara tepat waktu setiap kali dibutuhkan; | Akses sebagaimana dimaksud pada angka ini dibutuhkan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan secara tepat waktu setiap kali dibutuhkan dalam rangka audit Teknologi Informasi, audit dan/atau pemeriksaan lain. Auditor Otoritas Jasa Keuangan termasuk auditor eksternal yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |
|  |  | * + 1. menyatakan tidak berkeberatan dalam hal Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pihak lain yang sesuai undang-undang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, akan melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan penyediaan jasa yang diberikan; | Cukup jelas. |  |
|  |  | * + 1. sebagai pihak terafiliasi, menjaga keamanan seluruh informasi termasuk rahasia LJKNB dan data pribadi konsumen; | Informasi termasuk sistem dan perangkat yang digunakan untuk memproses, menyimpan, dan mengirimkan informasi, merupakan aset yang harus dijamin keamanannya oleh pihak penyedia jasa dengan cara dilindungi dari musuh dan ancaman bahaya yang dapat mengganggu prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*). |  |
|  |  | * + 1. hanya dapat melakukan pengalihan sebagian kegiatan (subkontrak) berdasarkan persetujuan LJKNB yang dibuktikan dengan dokumen tertulis; | Cukup jelas. |  |
|  |  | * + 1. melaporkan kepada LJKNB setiap kejadian kritis yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan dan/atau mengganggu kelancaran operasional LJKNB; | Cukup jelas. |  |
|  |  | * + 1. menyampaikan hasil audit Teknologi Informasi yang dilakukan auditor independen secara berkala terhadap penyelenggaraan Pusat Data, Pusat Pemulihan Bencana, dan/atau Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi Informasi, kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui LJKNB yang bersangkutan; | Yang dimaksud dengan “secara berkala” adalah pelaksanaan audit sesuai dengan *risk appetite* LJKNB terhadap jasa yang diberikan oleh pihak penyedia jasa Teknologi Informasi.  Cakupan audit yang dilakukan oleh auditor independen termasuk sistem aplikasi yang digunakan untuk memproses data LJKNB. |  |
|  |  | * + 1. menyediakan Rencana Pemulihan Bencana yang teruji dan memadai; | Cukup jelas. |  |
|  |  | * + 1. bersedia untuk adanya kemungkinan penghentian perjanjian sebelum jangka waktu perjanjian berakhir (*early termination*); dan memenuhi tingkat layanan sesuai dengan *service level agreement* antara LJKNB dan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi; dan | Cukup jelas. |  |
|  |  | * + 1. memenuhi tingkat layanan sesuai dengan *service level agreement* antara LKNB dan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi. | Pemenuhan tingkat layanan dilakukan antara lain dengan memastikan penyelenggaraan Teknologi Informasi dapat mendukung LJKNB beroperasi sebagaimana mestinya. |  |
|  |  | 1. Penggunaan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi oleh LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didasarkan pada perjanjian tertulis yang paling sedikit memuat kesediaan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi untuk menyelenggarakan dan/atau melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h. | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. LJKNB wajib melakukan proses seleksi dalam memilih pihak penyedia jasa Teknologi Informasi dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan didasarkan pada hubungan kerja sama secara wajar (*arm’s length principle*), dalam hal pihak penyedia jasa Teknologi Informasi merupakan pihak terkait dengan LJKNB. | Yang dimaksud dengan “hubungan kerja sama secara wajar (*arm's length principle*)” adalah kondisi dimana transaksi antar pihak bersifat independen sebagaimana pihak yang tidak terkait, antara lain memiliki kesetaraan dan didasarkan pada harga pasar yang wajar sehingga meminimalisasi terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*).  Yang dimaksud “pihak terkait” adalah pihak terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha masing-masing LJKNB. |  |
|  |  | 1. LJKNB wajib melakukan tindakan tertentu dalam hal terdapat kondisi berupa: |  |  |
|  |  | 1. memburuknya kinerja penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh penyedia jasa Teknologi Informasi yang dapat berdampak signifikan pada kegiatan usaha LJKNB; | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. pihak penyedia jasa Teknologi Informasi menjadi insolven, dalam proses menuju likuidasi, atau dipailitkan oleh pengadilan; | Yang dimaksud dengan “insolven” adalah tidak memiliki cukup dana untuk melunasi utang |  |
|  |  | 1. terdapat pelanggaran oleh pihak penyedia jasa Teknologi Informasi terhadap ketentuan rahasia LJKNB dan kewajiban merahasiakan data pribadi konsumen; dan/atau | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. terdapat kondisi yang menyebabkan LJKNB tidak dapat menyediakan data yang diperlukan dalam rangka pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. Tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling sedikit: | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diketahui oleh LJKNB; |  |  |
|  |  | 1. memutuskan tindak lanjut yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan termasuk penghentian penggunaan jasa dalam hal diperlukan; dan |  |  |
|  |  | 1. melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan segera setelah LJKNB menghentikan penggunaan jasa sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian. |  |  |
|  |  | 1. Dalam hal penggunaan penyedia jasa Teknologi Informasi atau rencana penggunaan penyedia jasa Teknologi Informasi menyebabkan atau diindikasikan akan menyebabkan kesulitan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat: | Indikasi kesulitan pengawasan antara lain:   1. Kesulitan otoritas pengawas dalam melakukan akses terhadap data dan informasi; 2. kesulitan dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap pihak penyedia jasa Teknologi Informasi; dan/atau 3. pihak penyedia jasa Teknologi Informasi digunakan sebagai media untuk melakukan rekayasa data LJKNB dan/atau rekayasa keuangan LJKNB. |  |
|  |  | 1. memerintahkan LJKNB untuk menghentikan penggunaan jasa Teknologi Informasi sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian; atau |  |  |
|  |  | 1. menolak rencana penggunaan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi yang diajukan oleh LJKNB. |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Bagian Kedua |  |  |
|  |  | Penempatan Sistem Elektronik pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 1. LJKNB wajib menempatkan Sistem Elektronik pada Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana di wilayah Indonesia. | *Data center*/pusat data merupakan sebuah lokasi yang dipergunakan untuk menempatkan sistem komputer serta elemen-elemen yang berkaitan antara lain system komunikasi data dan penyimpanan data.  Contoh *data center*: dalam suatu ruangan yang dikhususkan sebagai data center terdapat beberapa perangkat komputer, router, switching, peralatan pendingin, catu daya, UPS, security, serta jaringan yang terkoneksi, baik itu jaringan intranet maupun internet, yang memastikan operasional perusahaan tetap berjalan baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan darurat.  Sedangkan *Disaster Recovery Center*/Pusat Pemulihan Bencana merupakan lokasi cadangan penempatan sistem komputer serta elemen-elemen yang berkaitan, yang digunakan untuk menghadapi bencana yang dihadapi perusahaan.  Contoh DRC:  Perusahaan ABC yang kantor pusatnya di Jakarta memiliki *data center* di Jakarta, namun juga memiliki DRC di Serpong, BSD yang minim dari bencana alam. Dengan demikian dalam hal terjadi bencana kebakaran atau bencana alam, Perusahaan ABC masih dapat beroperasi dengan baik. |  |
|  |  | 1. LJKNB hanya dapat menempatkan Sistem Elektronik pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di luar wilayah Indonesia sepanjang mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. Sistem Elektronik yang dapat ditempatkan pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. Sistem Elektronik yang digunakan untuk mendukung analisis terintegrasi dalam rangka memenuhi *home regulatory* yang bersifat global, termasuk lintas negara; | Yang dimaksud dengan “*home* *regulatory*” adalah ketentuan yang diterbitkan oleh otoritas negara asal bank.  Dalam hal ini *home* *regulatory* untuk kantor cabang adalah sesuai dengan kedudukan kantor pusat LJKNB di luar negeri.  Yang dimaksud aturan lain dalam hal ini adalah ketentuan dalam rangka untuk kepentingan publik atau negara, penegakan hukum, atau penerapan prinsip kehati-hatian |  |
|  |  | 1. Sistem Elektronik yang digunakan untuk manajemen risiko secara terintegrasi dengan kantor pusat atau kantor induk/kantor entitas utama di luar wilayah Indonesia; | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. Sistem Elektronik yang digunakan dalam rangka penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme secara terintegrasi dengan kantor pusat LJKNB atau kantor induk LJKNB di luar wilayah Indonesia; | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. Sistem Elektronik yang digunakan dalam rangka pelayanan kepada konsumen global, yang membutuhkan integrasi dengan sistem elektronik milik grup LJKNB di luar wilayah Indonesia; | Konsumen global adalah konsumen yang tidak hanya tercatat sebagai konsumen LJKNB di Indonesia namun juga tercatat sebagai konsumen kantor LJKNB dan/atau grup LJKNB yang sama di luar wilayah Indonesia.  Pelayanan terhadap konsumen global tersebut berupa Sistem Elektronik *front end* yang digunakan LJKNB atau konsumen untuk mendapatkan layanan yang disediakan secara global bagi seluruh konsumennya baik di dalam/luar negeri. Adapun sistem elektronik akhir yang memproses dan/atau menyimpan data individu, akun dan/atau transaksi konsumen tidak termasuk dalam lingkup pelayanan ini. |  |
|  |  | 1. Sistem Elektronik yang digunakan untuk manajemen komunikasi antara kantor pusat dengan kantor cabang atau antara anak perusahaan dengan perusahaan induk; dan/atau | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. Sistem Elektronik yang digunakan untuk manajemen internal. | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam hal LJKNB: |  |  |
|  |  | 1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. menyampaikan hasil analisis risiko negara (*country risk*); | Risiko negara (*country risk*) adalah segala kemungkinan yang muncul pada suatu negara yang dapat menimbulkan kerugian yang berdampak kepada LJKNB yang menempatkan Sistem Elektronik pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di negara tersebut, contohnya ketidakstabilan kondisi politik dan ekonomi, rawan bencana, perang, dan lain-lain. |  |
|  |  | 1. memastikan penyelenggaraan Sistem Elektronik di luar wilayah Indonesia tidak mengurangi efektifitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan yang dibuktikan dengan surat pernyataan; | Yang dimaksud dengan “tidak mengurangi efektifitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan” adalah tidak menimbulkan kesulitan pengawas dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan seperti adanya akses terhadap Pangkalan Data dan memiliki struktur Pangkalan Data dari setiap aplikasi yang digunakan. |  |
|  |  | 1. memastikan bahwa informasi mengenai rahasia LJKNB hanya diungkapkan sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama antara LJKNB dan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi; | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. memastikan bahwa perjanjian tertulis dengan penyedia jasa Teknologi Informasi juga memuat klausula pilihan hukum (*choice of law)*; | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. menyampaikan surat pernyataan tidak keberatan dari otoritas pengawas penyedia jasa Teknologi Informasi di luar wilayah Indonesia bahwa Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan terhadap pihak penyedia jasa Teknologi Informasi; | Surat pernyataan disampaikan apabila pihak penyedia jasa Teknologi Informasi memiliki otoritas pengawasan. |  |
|  |  | 1. menyampaikan surat pernyataan bahwa LJKNB akan menyampaikan secara berkala hasil penilaian yang dilakukan kantor LJKNB di luar wilayah Indonesia atas penerapan manajemen risiko pada pihak penyedia jasa Teknologi Informasi; | Yang dimaksud dengan “kantor LJKNB di luar wilayah Indonesia” adalah LJKNB yang kantor induknya merupakan lembaga keuangan asing yang berada di luar wilayah Indonesia.  Surat pernyataan disampaikan termasuk apabila LJKNB memiliki kantor LJKNB di wilayah yang sama dengan wilayah kedudukan penyedia jasa Teknologi Informasi. |  |
|  |  | 1. memastikan manfaat dari rencana penempatan Sistem Elektronik di luar wilayah Indonesia bagi LJKNB lebih besar daripada beban yang ditanggung oleh LJKNB; dan | Manfaat yang diharapkan antara lain peningkatan kualitas layanan kepada konsumen serta penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. |  |
|  |  | 1. menyampaikan rencana LJKNB untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia LJKNB baik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Teknologi Informasi maupun transaksi bisnis atau produk yang ditawarkan. | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. Dalam hal terdapat rencana menyelenggarakan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LJKNB wajib menyampaikan permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum penyelenggaraan kegiatan oleh pihak penyedia jasa Teknologi Informasi efektif dioperasikan. | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. | Cukup jelas. |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 1. LJKNB wajib memastikan bahwa Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat menjamin kelangsungan usaha LJKNB. | Yang dimaksud dengan “menjamin kelangsungan usaha” adalah memastikan bahwa kelangsungan usaha tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya ketika terjadi bencana atau gangguan, termasuk menjamin kesiapan Sistem Elektronik yang terdapat dalam Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana. |  |
|  |  | 1. Pengelolaan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Bagian Ketiga |  |  |
|  |  | Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi Informasi oleh Pihak Penyedia Jasa |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 1. LJKNB wajib menyelenggarakan Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi Informasi di wilayah Indonesia. | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi Informasi dapat dilakukan oleh pihak penyedia jasa di wilayah Indonesia. | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi Informasi oleh pihak penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang: |  |  |
|  |  | 1. memenuhi prinsip kehati-hatian; | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); dan | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. memperhatikan aspek perlindungan kepada konsumen. | LJKNB tetap bertanggung jawab atas setiap transaksi yang pemrosesannya diserahkan kepada pihak penyedia jasa. |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 1. LJKNB wajib memuat rencana penggunaan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan Pusat Data, Pusat Pemulihan Bencana, dan/atau Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi Informasi dalam rencana pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi LJKNB. | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. Realisasi rencana penyelenggaraan Pusat Data, Pusat Pemulihan Bencana, dan/atau Pemrosesan Berbasis Teknologi Informasi oleh pihak penyedia jasa Teknologi Informasi wajib dilaporkan sebagai bagian dari laporan realisasi rencana bisnis. | Cukup jelas. |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | LAYANAN KEUANGAN ELEKTRONIK |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | LJKNB yang menyelenggarakan Layanan Keuangan Elektronik wajib memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang terkait. | Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha masing-masing LJKNB dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | LJKNB wajib memuat rencana penerbitan produk Layanan Keuangan Elektronik dalam rencana bisnis LJKNB. | Yang dimaksud “produk Layanan Keuangan Elektronik” adalah produk keuangan dan/atau kegiatan usaha yang transaksinya dilakukan secara elektronik. |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 1. LJKNB wajib menerapkan prinsip pengendalian pengamanan data konsumen dan transaksi Layanan Keuangan Elektronik pada setiap Sistem Elektronik yang digunakan oleh LJKNB. | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. Prinsip pengendalian pengamanan data konsumen dan transaksi Layanan Keuangan Elektronik pada setiap Sistem Elektronik paling sedikit mencakup: | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. kerahasiaan; |  |  |
|  |  | 1. integritas; |  |  |
|  |  | 1. ketersediaan; |  |  |
|  |  | 1. keaslian; |  |  |
|  |  | 1. tidak dapat diingkari; |  |  |
|  |  | 1. pengendalian otorisasi dalam sistem, Pangkalan Data, dan aplikasi; dan |  |  |
|  |  | 1. pemisahan tugas dan tanggung jawab; dan |  |  |
|  |  | 1. pemeliharaan jejak audit. |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | PENGAMANAN  KERAHASIAAN DATA PRIBADI KONSUMEN |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Dalam menyelenggarakan Teknologi Informasi, LJKNB wajib: | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. menjamin perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pengungkapan data pribadi konsumen dilakukan berdasarkan persetujuan konsumen yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan |  |  |
|  |  | 1. menjamin penggunaan atau pengungkapan data pribadi konsumen dilakukan berdasarkan persetujuan konsumen yang bersangkutan dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada konsumen pada saat perolehan data. |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | PELAPORAN |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 1. LJKNB wajib melaporkan kejadian kritis, penyalahgunaan, dan/atau kejahatan dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi yang dapat dan/atau telah mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan dan/atau mengganggu kelancaran operasional LJKNB. | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah kejadian kritis dan/atau penyalahgunaan atau kejahatan diketahui. |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | PEMERIKSAAAN |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan atau meminta LJKNB untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh aspek terkait penggunaan Teknologi Informasi. | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. LJKNB wajib menyediakan akses kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat melakukan pemeriksaan pada seluruh aspek terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi yang diselenggarakan sendiri dan/atau yang diselenggarakan oleh pihak lain. | Cukup jelas. |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | PENEGAKAN KEPATUHAN |  |  |
|  |  | Bagian Kesatu |  |  |
|  |  | Sanksi Administratif |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 20, Pasal 21 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berlaku sampai dengan dipenuhinya ketentuan. | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. LJKNB yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. Dalam hal LJKNB melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, tetap dikenai sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. Dalam hal LJKNB telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis. | Cukup jelas. |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Bagian Kedua |  |  |
|  |  | Penurunan Hasil Penilaian  Tingkat Kesehatan serta Penilaian Kembali  terhadap Pihak Utama LJKNB |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan LJKNB tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan dapat: | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan; dan/atau |  |  |
|  |  | 1. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama LJKNB. |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | KETENTUAN PERALIHAN |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku: | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan bagi LJKNB yang memiliki total aset lebih dari Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah); |  |  |
|  |  | 1. 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan bagi LJKNB yang memiliki total aset lebih dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah); |  |  |
|  |  | 1. 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan bagi LJKNB yang memiliki total aset lebih dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); dan |  |  |
|  |  | 1. 5 (lima) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan bagi LJKNB yang memiliki total aset sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah). |  |  |
|  |  | 1. Bagi LJKNB yang telah menempatkan Sistem Elektronik pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di luar wilayah Indonesia saat ketentuan ini ditetapkan, wajib mengajukan permohonan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. | Cukup jelas. |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | KETENTUAN PENUTUP |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian dan pemblokiran kekayaan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah tidak berlaku bagi pelanggaran atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Cukup jelas. |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku: | Cukup jelas. |  |
|  |  | 1. Pasal 49 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5992); |  |  |
|  |  | 1. Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 huruf a dan huruf c, dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.05/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005); |  |  |
|  |  | 1. Pasal 19 ayat (2) huruf c POJK 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6286); |  |  |
|  |  | 1. Pasal 14 ayat (2) huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6320); |  |  |
|  |  | 1. Pasal 2 ayat (3) huruf d dan 49 ayat (2) huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6356), |  |  |
|  |  | dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | Cukup jelas. |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. |  |  |
|  |  | Ditetapkan di Jakarta  pada tanggal 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | KETUA DEWAN KOMISIONER  OTORITAS JASA KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA  WIMBOH SANTOSO |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Diundangkan di Jakarta  pada tanggal  MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  REPUBLIK INDONESIA,  YASONNA H. LAOLY |  |  |